

PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTEREN TERHADAP PENERIMAAN OPINI WTP PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

Oleh:

¹Elsa Fitri Amran, ²Ramadhani Saputri, ³Nasfizar Guspendri, ⁴Sri Adella Fitri,
⁵Nofrivul

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Jalan Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar 27217 Telp: (0752) 71150

e-mail :elsafitriamran@uinmybatusangkar.ac.id¹, ramadhanisaputri12@gmail.com²,
nasfizarguspendri@uinmybatusangkar.ac.id³, sriadellafitri@uinmybatusangkar.ac.id⁴,
nofrivul@uinmybatusangkar.ac.id⁵

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of accounting information systems and internal control systems on the acceptance of WTP opinions in the Regional Government of Tanah Datar Regency. This type of research is a type of field research (Field Research) with a quantitative approach. The technique used in sampling is Quota Sampling. Data analysis techniques used were validity, reliability, descriptive statistical analysis, and classical assumption tests, multiple linear analysis tests, and hypothesis testing, with the help of the SPSS version 26 program. The results showed that the application of accounting information systems had a significant effect on acceptance of WTP Opinion Tanah Datar District Government. The internal control system has no significant effect on the acceptance of WTP opinion at the Regional Government of Tanah Datar Regency. The accounting information system and internal control system have a significant effect on the acceptance of WTP opinions in the Regional Government of Tanah Datar Regency. The accounting information system and internal control system have a significant effect on the acceptance of WTP opinion at the Tanah Datar District Government together.

Keywords: Accounting Information System; Internal Control System; and Opinion of WTP

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian interen terhadap penerimaan opini WTP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian adalah jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yakni Sampling Kuota. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, realibilitas, analisis statistik deskriptif, dan uji asumsi klasik, uji analisis linear berganda, serta uji hipotesis, dengan bantuan program SPSS versi 26. Hasil penelitian adalah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Opini WTP pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Sistem pengendalian interen berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini WTP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian interen berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan opini WTP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Secara Bersama-

sama Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian interen berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini WTP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi; Sistem Pengendalian Interen; Opini WTP

PENDAHULUAN

Di era globalisasi sekarang ini mewujudkan pemerintahan yang baik menjadi suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi keberadaannya dan mutlak terpenuhi. Prinsip pemerintahan yang baik meliputi transparansi dan akuntabilitas yang diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya, keterbukaan dan transparansi yang mana artinya masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya dan ketaatan pada hukum artinya seluruh kegiatan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku secara adil dan konsisten serta partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan umum dan pembangunan.

Dimana untuk menciptakan pemerintahan yang baik, transparansi dan akuntabilitas maka pemerintah tersebut, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkeinginan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan yang telah di audit oleh badan pemeriksa keuangan republik Indonesia (BPK RI). Laporan hasil pemeriksaan yang sudah di periksa oleh badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berdasarkan UU No 15 Tahun 2004 pasal 16 ayat 1 sudah dijelaskan bahwa hasil dari laporan keuangan pemerintah memuat opini (Undang-Undang Nomor 15, 2004).

Opini audit itu sendiri merupakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit dan diberikan pertimbangan profesional akuntan yang telah diatur SPAP. Auditor mempunyai fungsi meningkatkan mutu penyajian laporan keuangan perusahaan kepada masyarakat, yaitu dengan cara melaksanakan audit atas kewajaran laporan keuangan ditinjau dari kesesuaian dengan prinsip akuntansi berterima umum (Setiyanti, 2012).

Kegunaan audit secara umumnya adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan republik Indonesia (BPK RI) sudah disajikan secara wajar sehingga memperoleh sebuah opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dari opini tersebut maka pemerintah pusat maupun daerah akan mendapatkan akuntabilitas yang baik sebagai entitas kepada para publik atau masyarakat, serta tingkat kepercayaan atas laporan keuangan pemerintah semakin meningkat dan dapat dijadikan sebagai instrument untuk pembuat keputusan.

Apabila suatu pemerintahan baik itu pemerintah pusat maupun daerah ingin meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) maka, usaha atau langkah-langkah yang dilakukan adalah : (1) Meningkatkan sistem informasi akuntansi (SIA) agar laporan keuangan pemda yang disusun selalu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan penjelasan/pengungkapannya cukup (2) Dalam pengelolaan dan tata usaha keuangan daerah patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku (3) Meningkatkan efektifitas sistem pengendalian interen yang ada, sehingga bisa mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah (4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang menguasai akuntansi keuangan daerah yang ditempatkan di SKPD dan PPKD, demikian juga peningkatan SDM dalam bidang pengelolaan keuangan daerah (5) Meningkatkan kualitas hasil revidu atas LKPD yang dilaksanakan oleh APIP (Inspektorat Daerah), sehingga LKPD yang telah di revidu berkualitas dan pada akhirnya tidak banyak kesalahan/temuan apabila di audit oleh badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) (Fuat, 2012).

Secara umumnya upaya yang dilakukan untuk mrncapai opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yaitu Meningkatkan sistem informasi akuntansi, Meningkatkan sistem pengendalian inetern (SPI) Dan lain sebagainya. Untuk sistem informasi akuntansi (SIA) adalah rangkaian dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu fungsi penting dari sistem informasi akuntansi adalah pengendalian internal, untuk itu sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sebuah jaringan dari seluruh prosedur, formulir-formulir, catatan-catatan, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang akan digunakan oleh pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan usahanya dan selanjutnya digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajemen (Marina et al., 2017).

Sedangkan untuk sistem pengendalian interen (SPI) merupakan elemen yang sangat penting dalam pengelolaan dan merupakan dasar bagi kegiatan operasional yang aman, sehat dan dapat berkembang secara wajar. Sistem pengendalian interen (SPI) membantu pengurus dan pengelola menjaga asetnya. Tidak hanya itu dengan sistem pengendalian internal (SPI) akan menjamin terujinya pelaporan keuangan, manajerial yang akurat dan dapat diandalkan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomis dan efisien, meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Dengan adanya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian interen maka adanya keterbukaan dan transparansi terhadap laporan keuangan. Di Indonesia baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan adanya perolehan opini wajar tanpa pengecualian yag diberikan oleh badan pemeriksa keuangan republik Indonesia (BPK RI) dimana opini ini diperoleh berdasarkan laporan keuangan yang telah diperiksa dan telah disajikan secara wajar.

Dimana, didalam laporan keuangan terdapat beberapa komponen-komponen yang ada di dalam sebuah laporan keuangan. Berdasarkan peraturan permendagri No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), komponen-komponen tersebut terdiri atas : (1) Laporan Realisasi Anggaran atau LRA (2) Laporan Perebahan Saldo Anggaran Lebi (3) Laporan Operasional (4) Laporan Perubahan Ekuitas (5) Neraca (6) Laporan Arus Kas (7) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan komponen-komponen tersebut maka, penyelenggaraan pemerintah pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dicerminkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang saatnya akan di audit oleh BPK dan diberikan sebuah opini audit. Baik itu opini audit wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak memberikan pendapat dan tidak wajar.

Di Indonesia sendiri perkembangan opini audit di laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL) di tinjau pada periode 2016-2020.

Tabel 1
Perkembangan Opini Audit LKKL

Opini Audit	Tahun 2016	Tahun 2020	% Naik/Turun	Keterangan
WTP	84%	98%	14%	Naik
WDP	9%	2%	6%	Turun
TMP	7%	0%	7%	Turun

Sumber: (BPK RI), 2021)

Keterangan :

WTP : wajar tanpa pengecualian

WDP : wajar dengan pengecualian

TMP : tidak memberikan pendapat

Berdasarkan tabel diatas maka bisa dikatakan bahwasanya perkembangan opini audit wajar tanpa pengecualian mengalami kenaikan sebesar 14%, sedangkan opini wajar dengan pengecualian mengalami penurunan sebesar 6% serta penurunan pada opini audit tidak memberikan pendapat sebesar 7%. Capaian opini WTP sebesar 98% merupakan hasil usaha pemerintah dan kontribusi BPK dalam mendorong terwujudnya tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan.

Sedangkan, dalam 5 tahun terakhir (2016-2020), opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengalami perbaikan.

Tabel 2
Perkembangan Opini Audit LKDP

Opini Audit	Tahun 2016	Tahun 2020	% Naik/Turun	Keterangan
WTP	70%	90%	20%	Naik
TMP	4%	0,7%	3,3%	Turun
TW	0%	0,3%	0,3%	Naik

Sumber : (BPK RI), 2021)

Keterangan :

WTP : wajar tanpa pengecualian

TMP : tidak memberikan pendapat

TW : tidak wajar

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa LKPD mengalami kenaikan atau perbaikan dimana, perolehan opini wajar tanpa pengecualian naik sebesar 20%, serta adanya penurunan opini tidak menerima pendapat sebesar 3,3% dari 4% dan walaupun adanya penerimaan opini tidak wajar sebesar 0,3% dari yang sebelumnya tidak ada, masih bisa dikatakan perkembangan LKPD sudah ada peningkatan dari WTP mengalami kenaikan dan dari TMP mengalami penurunan.

Untuk Sumatera Barat sendiri laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintahnya sudah mengalami Kenaikan dari tahun 2012-2020. Dari 19 entitas yang ada, 18 Kabupaten/Kota sudah meraih opini WTP dari tahun ke tahun. Untuk 1 entitas lainnya mengalami penurunan predikat dari WTP menjadi WDP (Padang, 2022).

Dari 19 entitas yang ada salah satunya Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar yang merima opini audit WTP tahun 2020 lalu, dan sudah mendapatkan opini audit WTP untuk pertama kali di tahun 2009, dan meraih kembali di tahun 2012 sampai 2021. Pencapaian ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Datar, 2021).

Di lihat dari pencapaian kabupaten Tanah Datar terhadap laporan keuangan yang sudah menerima predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari 10 tahun terakhir maka dari penerimaan tersebut tentu adanya upaya atau langkah yang dicapai untuk mendapatkan opini audit tersebut. Setelah dilakukan wawancara dengan pegawai pemerintahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu ibu Fitri dan Bapak Adex bahwa untuk mencapai opini WTP adalah komitmen dari pimpinan kepada bawahan, melakukan penyesuaian pada sistem informasi akuntansinya terhadap aplikasi SIMDA, reviu sistem

pengendalian interen secara berkala oleh Inspektorat kabupaten Tanah Datar, dan Peningkatan sumber daya manusia (SDM). Meskipun Opini WTP sudah berkali-kali di peroleh Kabupaten Tanah Datar akan tetapi, hal seperti ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk di raih. Karena opini WTP bukan hal yang mudah diperoleh karena ini berhubungan dengan laporan keuangan, untuk itu perlunya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian interen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian interen terhadap penerimaan opini WTP pada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah rangkaian dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu fungsi penting dari sistem informasi akuntansi adalah pengendalian internal, untuk itu sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sebuah jaringan dari seluruh prosedur, formulir-formulir, catatan-catatan, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang akan digunakan oleh pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan usahanya dan selanjutnya digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajemen (Marina et al., 2017).

Menurut Krismiaji (2015) Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan. Untuk dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pembuat keputusan, sistem informasi harus melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan transaksi dan data lain dan memasukkannya ke dalam sistem.
2. Memproses data transaksi.
3. Menyimpan data untuk keperluan di masa mendatang.
4. Mengendalikan seluruh proses sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah suatu sistem pengelompokan, pencatatan, dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang begitu pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka pengelolaan, dan akses terhadap informasi keuangan daerah dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat (Pujiswara, 2014)

Sistem Pengendalian Interen

Sedangkan untuk sistem pengendalian interen merupakan elemen yang sangat penting dalam pengelolaan dan merupakan dasar bagi kegiatan operasional yang aman, sehat dan dapat berkembang secara wajar. Sistem pengendalian interen membantu pengurus dan pengelola menjaga asetnya. Tidak hanya itu dengan sistem pengendalian internal akan menjamin terujinya pelaporan keuangan, manajerial yang akurat dan dapat diandalkan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomis dan efisien, meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

COSO adalah sebuah organisasi swasta yang beranggotakan *the American Accounting Association (AAA)*, *American Institute of Certified Publik Accountants*

(AICPA), the Institute of Internal Auditor (IIA), the Institute of Management Accountants (IMA), dan the Financial Executives Institute (FEI). Organisasi ini pada tahun 1992 mengeluarkan hasil sebuah studi untuk menghasilkan definisi pengendalian intern dan petunjuk untuk melakukan penilaian sebuah sistem pengendalian intern, yang dikenal dengan model pengendalian intern (*Internal Control Model*). Produk COSO ini segera diterima secara luas sebagai otoritas pengendalian intern oleh manajemen, akuntan, auditor, dan para pemakai laporan keuangan (Graham, 2015).

Model pengendalian intern ini menetapkan pengendalian intern sebagai proses yang diterapkan oleh dewan direktur, manajemen, dan untuk memberikan jaminan yang cukup bahwa tujuan pengendalian berikut ini dapat dicapai, yaitu:

1. Efektifitas dan efisiensi operasi
2. Daya andal pelaporan keuangan
3. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku

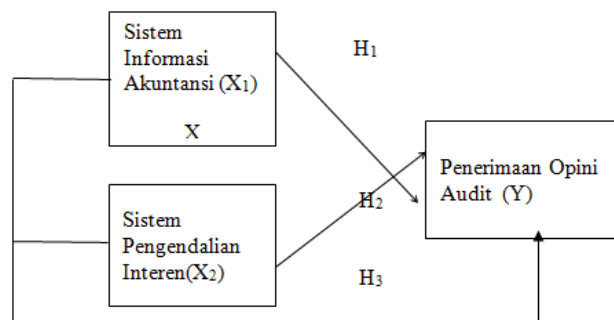
Pengendalian intern didefinisikan sebagai sebuah proses karena pengendalian intern melekat dalam kegiatan operasional sebuah organisasi, dan merupakan bagian yang integral dari aktivitas dasar manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan organisasi. Pengendalian intern memberikan jaminan yang layak (bukan jaminan absolut) karena kemungkinan terjadinya *human failure*, kolusi, dan *management override*.

Opini Audit

Opini Audit merupakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit dan diberikan pertimbangan profesional yang telah diatur SPAP. auditor mempunyai fungsi meningkatkan mutu penyajian laporan keuangan perusahaan kepada masyarakat, yaitu dengan cara melaksanakan audit atas kewajaran laporan keuangan ditinjau dari kesesuaian dengan prinsip akuntansi berterima umum (Setiyanti, 2012).

Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion* merupakan pernyataan tentang laporan keuangan suatu entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar pada 10 tahun terakhir sudah memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian, dengan salah satu cara untuk memperoleh predikat tersebut adalah dengan menerapkan sistem informasi akuntansi disini merujuk pada aplikasi SIMDA yang digunakan untuk mengolah laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dan sistem pengendalian intern guna untuk me review atau melakukan pengawasan/pemantauan terhadap laporan keuangan yang telah di buat, sehingga kesalahan-kesalahan/temuan-temuan pada laporan keuangan bisa diperbaiki.



Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual

Hipotesis

- 1) H_{01} : Diduga tidak ada pengaruh antara sistem informasi akuntansi terhadap penerimaan opini audit pada pemerintah daerah kabupaten Tanah Datar.
- 2) H_{a1} : Diduga ada pengaruh antara sistem informasi akuntansi terhadap penerimaan opini audit pada pemerintah daerah kabupaten Tanah Datar.
- 3) H_{02} : Diduga tidak ada pengaruh antara sistem pengendalian interen terhadap penerimaan opini audit pada pemerintah daerah kabupaten Tanah Datar.
- 4) H_{a2} : Diduga ada pengaruh antara sistem pengendalian interen terhadap penerimaan opini audit pada pemerintah daerah kabupaten Tanah Datar.
- 5) H_{03} : Diduga tidak ada pengaruh antara sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian interen terhadap penerimaan opini audit pada pemerintah daerah kabupaten Tanah Datar.
- 6) H_{a3} : Diduga ada pengaruh antara sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian interen terhadap pemerintah daerah kabupaten Tanah Datar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah *field research* (Penelitian Lapangan) dengan pendekatan kuantitatif, yakni penafsiran dan pemecahan kasus penelitian dengan menggunakan statistik (SPSS versi 26). Tempat penelitian dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dan Inspektorat Kabupaten Tanah Datar. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah beberapa OPD (organisasi perangkat daerah) di Kabupaten Tanah Datar berjumlah 23 OPD, masing-masing OPD 2 yang dijadikan sampel sehingga total nya 46 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan Teknik *sampling kuota*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis dan uji regresi linier berganda (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas Sistem Informasi Akuntansi

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Sistem Informasi Akuntansi

Nomor Butir Angket	R/hitung	r/tabel	Ket
Butir 1	0.490	0.30	Valid
Butir 2	0.421	0.30	Valid
Butir 3	0.490	0.30	Valid
Butir 4	0.426	0.30	Valid
Butir 5	0.642	0.30	Valid
Butir 6	0.522	0.30	Valid
Butir 7	0.649	0.30	Valid
Butir 8	0.811	0.30	Valid
Butir 9	0.862	0.30	Valid

Sumber: Data diolah dengan aplikasi SPSS 26, 2022

Uji Validitas dilakukan dengan cara membandingkan angka r hitung dengan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka item dikatakan valid dan sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka item dikatakan tidak valid. Berdasarkan tabel 3 diatas, diketahui bahwa nilai r hitung item 1 sampai item 9 bernilai lebih besar dari nilai r tabel.

Maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan penelitian untuk variabel sistem Informasi akuntansi dinyatakan valid. Variabel sistem informasi akuntansi bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh terhadap penerimaan opini wajar tanpa pengecualian di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Uji Validitas Sistem Pengendalian Interen

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Interen

Nomor Butir Angket	R/hitung	r/tabel	Ket
Butir 1	0.658	0.30	Valid
Butir 2	0.464	0.30	Valid
Butir 3	0.605	0.30	Valid
Butir 4	0.447	0.30	Valid
Butir 5	0.609	0.30	Valid
Butir 6	0.306	0.30	Valid
Butir 7	0.464	0.30	Valid
Butir 8	0.512	0.30	Valid
Butir 9	0.662	0.30	Valid
Butir 10	0.512	0.30	Valid
Butir 11	0.586	0.30	Valid
Butir 12	0.616	0.30	Valid
Butir 13	0.576	0.30	Valid
Butir 14	0.473	0.30	Valid
Butir 15	0.609	0.30	Valid

Sumber : Data diolah dengan aplikasi SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 4 diatas, diketahui dan disimpulkan bahwa nilai r hitung pada item 1 benilai lebih besar dari r tabel maka pernyataan item 1 mengenai sistem pengendalian interen sampai item 15 dinyatakan valid. Variabel sistem pengendalian interen bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem pengendalian interen terhadap penerimaan opini wajar tanpa pengecualian di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Uji Validitas Opini WTP

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Opini WTP

Nomor Butir Angket	R/hitung	r/tabel	Ket
Butir 1	0.578	0.30	Valid
Butir 2	0.789	0.30	Valid
Butir 3	0.452	0.30	Valid
Butir 4	0.578	0.30	Valid
Butir 5	0.215	0.30	Valid
Butir 6	0.529	0.30	Valid
Butir 7	0.512	0.30	Valid
Butir 8	0.605	0.30	Valid
Butir 9	0.529	0.30	Valid
Butir 10	0.529	0.30	Valid
Butir 11	0.378	0.30	Valid
Butir 12	0.529	0.30	Valid

Sumber : Data diolah dengan aplikasi SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 5 diatas, dapat diketahui bahwa nilai r hitung pada item 1 benilai lebih besar dari r tabel maka pernyataan item 1 mengenai sistem pengendalian interen sampai item 12 dinyatakan valid. Variabel Opini WTP bertujuan untuk mengetahui

bagaimana proses/tahap memperoleh opini wajar tanpa pengecualian di Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Uji Reliabelitas

Uji reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Bukti pertanyaan dinyatakan realibel atau handal apabila jawaban dari seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. Pengukuran keandalan butir pertanyaan dengan sekali menyebarkan kuesioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar score jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan computer SPSS dengan fasilitas *Cronbach Alpha*. Konstruk dapat dikatakan realibel jika memberikan *Cronbach Alpha* > 0,60. Berikut hasil uji reabilitas data :

Tabel 6
Hasil Uji Reliabelitas

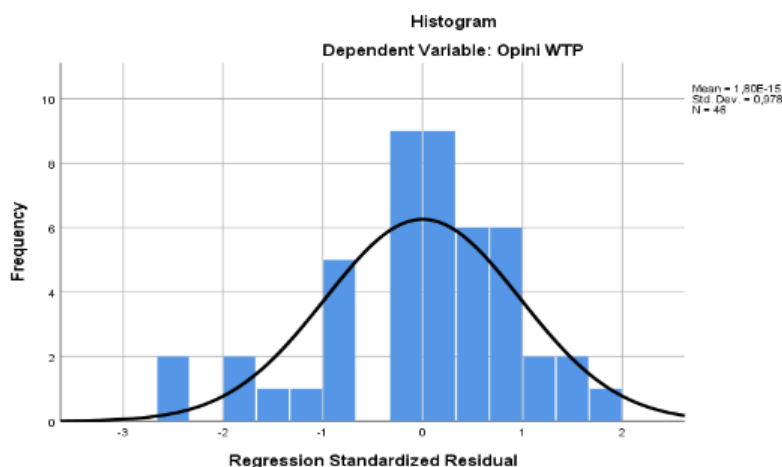
Variabel	Cronbach Alpha		Ket
Sistem Informasi Akuntansi	0.766	0.60	Reliabel
Sistem Pengendalian Interen	0.783	0.60	Reliabel
Opini WTP	0.728	0.60	Reliabel

Sumber : Data diolah dengan aplikasi SPSS 26, 2022

Uji reliabelitas dilakukan dengan cara membandingkan angka *Cronbach Alpha* dengan ketentuan nilai *Cronbach Alpha* minimal adalah 0.60, artinya jika nilai *Cronbach Alpha* yang didapatkan dari hasil perhitungan SPSS lebih besar dari 0.60 maka dapat disimpulkan kuisisioner tersebut realibel, dan sebaliknya jika nilai *Cronbach Alpha* kecil dari 0.60 maka kuisisioner dinyatakan tidak realibel. Berdasarkan tabel 6 diatas, menunjukkan bahwa semua variabel memiliki *Cronbach Alpha* lebih besar dari nilai 0.60, yang artinya setiap pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dengan arti kata bila pernyataan tersebut diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pertama kali dilakukan adalah uji normalitas untuk mengetahui apakah residual berdistribusi atau tidak. Nilali residuall terstandarisasi yang berdistribusi normal jika digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk gambar lonceng (bell-shaped curve) yang kedua sisinya melebar sampai titik tak terhingga.



Gambar 2. Uji Normalitas

Berdasarkan gambar grafik histogram diatas, bahwa grafik histogram memberikan distribusi yang berbentuk menyerupai lonceng, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam sesame variabel bebas saling mempengaruhi dalam model regresi. Cara menentukan ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Kriteria yang digunakan dalam uji multikolonieritas adalah “jika nilai tolerance >0.10 atau nilai $VIF < 10$ maka disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas”. Adapun hasil uji multikolonieritas adalah sebagai berikut:

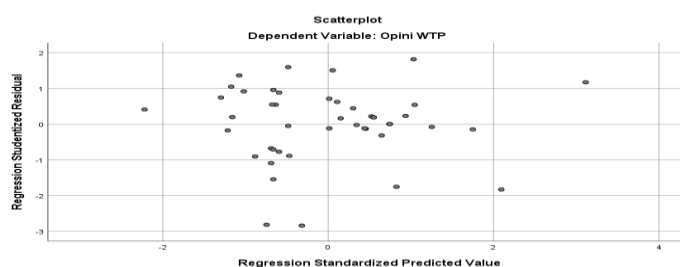
Tabel 7
Hasil Uji Multikolonieritas

No		Tolerance	VIF	Keterangan
1	Sistem Informasi akuntansi	0.918	1.090	Bebas Multikolonieritas
2	Sistem Pengendalian Interen	0.918	1.090	Bebas Multikolonieritas

Sumber : Data diolah pada aplikasi SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 7 terlihat bahwa seluruh variabel indenpenden memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel indenpenden dalam penelitian ini bebas multikolonieritas. Variabel indenpenden dalam penelitian ini adalah variabel sistem informasi akuntansi (X_1), dan sistem pengendalian interen (X_2), serta variabel Opini WTP (Y) dimana sudah saling mempengaruhi sesama variabel dalam model regresi.

Ada tidaknya heterokedasitas dapat diketahui menggunakan melalui grafik scatterplot antar nilai prediksi variabel indenpenden menggunakan nilai residualnya. Dasar analisis yang dapat dipakai untuk menentukan heterokedastisitas adalah: 1) apabila terdapat pola eksklusif misalnya titik-titik yang menciptakan pola eksklusif yang teratur (bergelombang melebar lalu menyempit), maka sudah terjadi heterokedastisitas. 2) apabila tidak terdapat pola yang kentara misalnya titik-titik menyebar diatas dan dibawah nomor 0 dalam sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas).



Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan grafik scatterplots memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk variabel indenpenden maupun variabel bebasnya.

Uji autokorelasi bertujuan mengidentifikasi adanya variabel pengganggu periode sekarang dengan periode sebelumnya. Untuk menentukan hasil uji autokorelasi dapat dilihat dari hasil tes Durbin- Watson dengan kriteria dalam pengambilan keputusan yaitu :

- 1) $DU < DW < 4-DU$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi
- 2) $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$ maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi
- 3) $DL < DW < DU$ atau $4-DU < DW < 4-DL$, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti. Berikut adalah hasil uji autokorelasi :

Tabel 8
Hasil Uji Autokorelasi

Nilai DW	Keterangan
2.021	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber : Data diolah dengan aplikasi SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 8 hasil uji autokorelasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji Durbin-Watson menunjukkan nilai DW sebesar 2.021, dimana nilai DW terletak diantara nilai DU dan nilai DU ($1.617 < \text{nilai DW}(2.021) < 4-DU (2.283)$) maka dinyatakan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Hipotesis Uji Parsial (T)

Uji t parsial bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh sendiri yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun hasil uji t dalam analisis penelitian ini adalah:

Tabel 9
Hasil Uji Parsial

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Signifikansi
Sistem Informasi Akuntansi	2.088	1.681	0,033
Sistem Pengendalian Interen	5.167		0,00

Sumber : Data diolah dengan aplikasi SPSS 26, 2022

Dari tabel 4.10 diatas didapatkan t_{hitung} dari masing-masing variabel bebas, selanjutnya t_{hitung} dengan t_{tabel} . Dengan taraf kesalahan 5% dan derajat kebebasan (df) = $n - 2 = 46 - 3 = 43$, diperoleh $t_{tabel} = 1.681$.

Berikut ini penjelasannya :

1) Sistem Informasi Akuntansi

Hasil statistik uji t untuk variabel sistem informasi akuntansi diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2.088 dan t_{tabel} 1.681 ($df = 43$), dengan tingkat signifikansi 0.033, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.088 > 1.681$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sedangkan signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($0.033 < 0.05$). Maka H_a diterima, yang menyatakan bahwa “sistem informasi akuntansi” berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan Opini WTP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

2) Sistem Pengendalian Interen

Hasil statistik uji t untuk variabel sistem pengendalian interen diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5.167 dan t_{tabel} 1.681 ($df = 43$), dengan tingkat signifikansi 0.000, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5.167 > 1.681$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sedangkan signifikansi lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$). Maka H_a diterima, yang menyatakan bahwa “sistem pengendalian interen” berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan Opini WTP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Uji Simultan (F)

Uji F merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Adapun hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat:

Tabel 10
Hasil Uji Simultan (F)

F _{hitung}	F _{tabel}	Sig	Signifikansi
20.300	3.20	0.05	0.000

Sumber : Data diolah dengan aplikasi SPSS 26, 2022

Dari hasil pengujian diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 20.300 dan F_{tabel} sebesar 3.20 dengan signifikansi sebesar 0.000. Oleh karena itu $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($20.300 > 3.20$) dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa “sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian interen secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan Opini WTP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Uji Koefisien (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk menentukan proporsi total variasi dalam variabel penelitian yang diterangkan oleh variabel bebas. adapun hasil uji determinasi pengaruh sitem informasi akuntansi dan sistem pengendalian interen terhadap penerimaan Opini WTP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Hasil Uji Determinasi

Nilai R	Nilai R Square	Adjust R Square
0.697	0.486	0.462

Sumber : Data diloah dengan aplikasi SPSS 26, 2022

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai Adjust R square diperoleh sebesar 0.462, artinya variabel sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian interen mapu menjelaskan variabel Opini WTP sebesar 46,2%. Sisanya yaitu 53.8% dipengaruhi oleh variabel lain

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian bertujuan untuk membuktikan hipotesis yang telah diajukan apakah sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian interen berpengaruh positif terhadap penerimaan Opini WTP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Berikut hasil iji regresi berganda :

Tabel 12
Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (B)	t _{hitung}	Signifikansi
Konstanta	9.701	1.641	0.008
Sistem Informasi Akuntnasi	0.226	2.088	0.033
Sistem Pengendalian Interen	0.484	5.167	0.000

Sumber : Data diolah dengan aplikasi SPSS 26, 2022

Dari tabel diatas didapat data konstanta 9.701 koefisien regresi variabel sistem informasi akuntansi (b_1) sebesar 0.226 dan sistem pengendalian interen (b_2) sebesar 0.484

Berdasarkan hasil dan penjelasan diatas maka didapat persamaan regresi linera berganda sebagai berikut:

$$Y = 9.701 + 0.226X_1 + 0.484X_2$$

Dimana :

- 1) Dari Persamaan regresi tersebut didapat konstanta sebesar 9.701, hal ini berarti bahwa jika sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian interen bernilai nol (0). Maka tingkat opini WTP sebesar 9.701.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel sistm informasi akuntansi (b1) sebesar 0.226 yang berarti setiap kenaikan satu (1) satuan variabel sistem informasi akuntansi akan terjadi peningkatan penerimaan opini WTP sebesar 0.226 dengan asumsi variabel lainnya bernilai nol (0).
- 3) Nilai koefisien regresiVariabel sistem pengendalian interen (X2) mempunyai koefisien sebesar 0.484 yang berarti setiap kenaikan satu (1) pada variabel sistem Pengendalian interen akan terjadi peningkatan penerimaan Opini WTP sebesar 0.484 dengan asumsi variabel lainnya bernilai nol (0).

PENUTUP

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian interen terhadap penerimaan opini WTP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah Sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini WTP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Sistem pengendalian interen berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini WTP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian interen secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan opini WTP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan penelitian dengan variable yang sama dengan metode penelitian campuran (mix method), agar informasi yang dihasilkan dapat relevan bagi pengguna dan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK. (2021). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan I Tahun 2021*.
<http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/3583>
- Datar, H. T. (2021). *Raih Opini WTP Sembilan Kali Berturut-turut*.
- Fuat, M. (2012). UPAYA PEMERINTAH DAERAH MEMPEROLEH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DARI BPK RI. *Pusdiklatwas.Bpkp.Go.Id*.
[https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/post/1070_a/upaya pemda-muh fuat.pdf](https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/post/1070_a/upaya%20pemda-muh%20fuat.pdf)
- Graham, L. (2015). *Internal Control Audit and Compliance*. Wiley.
- Undang-undang Nomor 15, (2004).
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar->

modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo

- Krismiaji, D. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Marina, A., Wahjono, S. I., Syaban, M., & Suarni, A. (2017). Sistem Informasi Akuntansi Teori dan Praktikal. In *Jakarta: Salemba Empat*.
- Padang, T. M. (2022). *Pemprov Sumbar Raih Opini WTP ke-10 Berturut-turut*. Metro Padang. <https://sumbar.bpk.go.id/pemprov-sumbar-raih-opini-wtp-ke-10-berturut-turut>
- Pujiswara, I. B. et al. (2014). Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Klungkung). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).
- Setiyanti, S. W. (2012). Jenis-Jensi Pendapat Auditor (Opini Auditor). *Jurnal STIE Semarang*, 4(2), 19–28.
- Sugiyono, P. (2017). *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. CV. Alfa Beta.